

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kelemahan sistem pengendalian intern adalah kondisi di mana banyak temuan-temuan kasus yang terjadi terkait pengendalian intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menurut Warren (2003), kelemahan sistem pengendalian intern dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat 4 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan sistem pengendalian intern yang bagus dan memadai. Implementasi dari Undang - Undang ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan dari pemerintah daerah maka harus memiliki pengendalian intern yang baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, harus diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang - Undang ini menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang sampai dengan saat ini masih berlaku tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, namun harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah mengharuskan seorang kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang berada di bawah naungannya secara adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Tujuan adanya otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, karena segala urusan yang berkaitan dengan masyarakat berada dalam naungan pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya otonomi daerah maka pelayanan publik dari pemerintah bisa lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pelayanan publik yang merata dan ada di setiap daerah diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antar daerah, seperti halnya yang terjadi sebelum masa reformasi. Kesenjangan antar daerah yang terjadi di Indonesia dikarenakan wilayahnya yang sangat luas dari ujung barat Sabang sampai di ujung timur Merauke. Melalui desentralisasi atau otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa, pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per Undang - Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dalam merancang sistem pengendalian intern (SPI) daerah mereka. SPIP terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Pemantauan Lingkungan Pengendalian.

Pengendalian Intern bagi instansi pemerintah adalah suatu proses integral yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu instansi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi akan tercapai. Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan dengan salah satu program yang dijalankan adalah dengan menyalurkan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) merupakan dana hibah kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang akan digunakan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi. Dana ini dihibahkan

melalui LPM dan bergulir sehingga tidak kembali lagi ke kas daerah tetapi terus berputar di Kelurahan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) telah berjalan selama 8 (delapan) tahun di Kelurahan Fatululi yang tentunya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kelurahan Fatululi menjadi kelurahan penunggak Dana PEM terbesar di tahun 2020, sehingga pengguliran Dana PEM pada Kelurahan Fatululi ini telah di hentikan sejak tahun 2018 untuk itu, kajian ini difokuskan untuk membahas unsur Lingkungan Pengendalian yang merupakan fondasi bagi keseluruhan unsur dalam Sistem Pengendalian Intern. Ruang lingkup kajian ini adalah untuk menganalisis faktor yang membentuk terjadinya tunggakan terbesar dana PEM pada kelurahan Fatululi tahun 2020 di lihat dari unsur lingkungan pengendalian yang terdiri dari; (1) Penegakan integritas dan nilai etika; (2) Komitmen Terhadap Kompetensi; (3) Kepemimpinan Yang Kondusif; (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; (8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masih banyak tunggakan yang belum dilunasi oleh penerima dan PEM kepada Pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Lingkungan Pengendalian Dalam Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dana PEM pada Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang ?
2. Apa dampak dari lemahnya lingkungan pengendalian di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
3. Apa solusi yang telah dilakukan LPM Kelurahan Fatululi dalam mengatasi penunggakan dana PEM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dana PEM Pada Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui dampak - dampak dari lemahnya lingkungan pengendalian di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang
3. Untuk mengetahui solusi yang telah ditempuh LPM Kelurahan Fatululi dalam mengatasi penunggakan dana PEM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep Lingkungan Pengendalian dalam upaya pengembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang ingin dicapai yaitu: bagi kelurahan, masyarakat dan penulis :

### a. Bagi Kelurahan

Sebagai bahan acuan untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat yang bersumber dari APBD dalam bentuk dana hibah melalui LPM dan digulirkan kepada masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan acuan untuk memberdayakan diri dalam hal penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala kecil.

### c. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk memahami dan mengerti tentang lingkungan pengendalian intern dalam pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.